

PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO DALAM UPAYA MENDORONG DISEMINASI INFORMASI

Winno Riskinda Irianto

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

winno.17041184078@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Letak geografis Indonesia yang luas akan menyebabkan kesenjangan informasi termasuk di Kabupaten Mojokerto. Untuk mengatasi kesenjangan informasi, pemerintah membentuk kelompok yang bergerak di bidang informasi agar diseminasi informasi dapat tercapai. Kelompok ini disebut Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM. Dengan adanya pembentukan KIM maka pemberdayaan perlu dilakukan oleh pemerintah setempat khususnya Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto agar KIM dapat berjalan sesuai dengan tugasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan KIM oleh Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto dalam upaya mendorong diseminasi informasi. Penelitian ini menggunakan Teori Pemberdayaan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto yang menjelaskan bahwa pemberdayaan meliputi 3 tahapan yaitu, tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto melakukan 3 tahapan pemberdayaan sesuai dengan teori yaitu pertama penyadaran, Diskominfo Kabupaten Mojokerto melakukan "ledhang" atau sosialisasi di setiap kecamatan yang ada Kabupaten Mojokerto. Kedua pengkapasitasan, Diskominfo Kabupaten Mojokerto memberikan kapasitas melalui kegiatan seminar, bimbingan teknis dan juga *workshop* terhadap KIM. Ketiga pendayaan, Diskominfo Kabupaten Mojokerto memberikan kepercayaan terhadap KIM untuk mengolah media secara mandiri.

Kata kunci: Pemberdayaan, Kelompok Informasi Masyarakat, Diseminasi Informasi

Abstract

Indonesia's vast geographic location will cause an information gap, including in Mojokerto Regency. To overcome the information gap, the government formed a group engaged in the information sector so that information dissemination can be achieved. This group is called the Community Information Group or KIM. With the formation of KIM, empowerment needs to be carried out by the local government, especially the Mojokerto District Communication and Information Service so that KIM can run according to its duties. The purpose of this research is to find out how the KIM empowerment by the Mojokerto District Communication and Information Service is in an effort to encourage information dissemination. This study uses Wrihatnolo and Dwidjowijoto's Empowerment Theory which explains that empowerment includes 3 stages namely, the awareness stage, the capacity building stage and the empowerment stage. The results showed that the Mojokerto District Communication and Information Service carried out 3 stages of empowerment in accordance with the theory, namely first awareness raising, the Mojokerto Regency Diskominfo carried out "ledhang" or socialization in every sub-district in Mojokerto Regency. The second is capacity building, Mojokerto Regency Diskominfo provides capacity through seminars, technical guidance and also workshops for KIM. The third is empowerment, the Mojokerto Regency Diskominfo gives trust to KIM to process media independently.

Keywords: Empowerment, Community Information Group, Information Dissemination

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Situasi Indonesia memiliki letak geografis yang luas akan mengakibatkan kesenjangan informasi di masyarakat, terutama di daerah yang belum memiliki akses untuk menerima informasi. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tanpa terkecuali termasuk masyarakat di pedesaan, karena sekarang ini informasi telah dijadikan sebagai kebutuhan bagi semua orang. Bila dilihat dengan adanya situasi dan kondisi seperti ini akan memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki kecakapan yang memenuhi untuk mengembangkan dan mengolah informasi secara mandiri, adanya faktor-faktor sosial seperti pendidikan, serta adanya keterbatasan dalam menjangkau akses atau kurangnya kemampuan masyarakat untuk mendayagunakan informasi seperti media sosial, atau berita-berita yang bersifat membangun.

Sementara itu informasi publik yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat akan menggerakkan keikutsertaan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan, oleh karenanya apabila ada pembangunan maka didasari dengan kepentingan rakyat. Dengan adanya hubungan itu, maka sudah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan juga pemerintah agar informasi dapat tersebar secara merata melalui media-media yang ada saat ini. Tentu saja hal ini bukan menjadi sesuatu yang mudah untuk masyarakat agar dapat menerima dan mengolah informasi publik yang berhubungan dengan pembangunan terutama bagi kepentingan bersama, karena pada kenyataan yang terjadi di lapangan, tidak semua masyarakat di Kabupaten Mojokerto belum memiliki kemampuan untuk mengolah informasi dengan baik yang disebabkan adanya keterbatasan dan kesenjangan akses informasi publik dan kurangnya wawasan masyarakat dalam menggunakan teknologi dengan melihat dari rendahnya tingkat pendidikan di daerah tersebut.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 telah mengatur tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Untuk mengatasi masalah kesenjangan informasi pemerintah mulai membentuk kelompok yang bergerak di bidang informasi sebagai tempat berkumpulnya individu yang mampu berkomunikasi dalam bidang pemberdayaan masyarakat terutama di lingkungan pedesaan. Permasalahan kesenjangan ini membuat pemerintah harus berpikir dan mulai mengembangkan jaringan informasi di setiap daerah dengan melakukan pembentukan Lembaga Komunikasi Sosial yaitu Kelompok Informasi Masyarakat atau disingkat KIM, yaitu program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang nantinya akan

diterapkan oleh badan pemerintahan seluruh Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika di setiap daerah akan mewakili dan menyelenggarakan sosialisasi terkait pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai lembaga informasi masyarakat, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibentuk dengan maksud agar nantinya dapat terwujud masyarakat yang memiliki kepekaan terhadap informasi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tergolong sebagai kelembagaan sosial adalah salah satu kelompok atau lembaga yang bergerak dalam hal pelayanan publik dibentuk dan dikelola secara khusus dari, oleh dan untuk masyarakat yang memiliki konsentrasi pada pelayanan informasi serta turut andil dalam hal pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masyarakat tersebut. Dengan visi mewujudkan masyarakat inovatif dalam hal mendayagunakan informasi serta mengusahakan setiap individu dapat mendapatkan hasil dan manfaat terutama untuk mencapai masyarakat informasi yang berdaya. Ada pula misi dari Kelompok Informasi Masyarakat yaitu terus mendorong setiap anggota agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi kelompok mandiri, ikut meningkatkan peranan dalam memperlancar arus informasi kepada setiap anggota, pemerintah dan juga masyarakat, memberikan kemampuan setiap anggota dan masyarakat dalam hal pengelolaan informasi untuk mengatasi adanya kesenjangan informasi publik. Menurut Yalia (2015) Kelompok Informasi Masyarakat mampu memberikan dampak berupa basis usaha dalam meningkatkan nilai ekonomi kelompok dan menyebarluaskan informasi sehingga dapat menjadi media yang memiliki fungsi untuk berperan aktif dalam sarana diseminasi informasi.

Dengan adanya hal tersebut maka dapat dipahami jika kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi sebuah keharusan yang sangat dibutuhkan dan dapat dijadikan sebagai ruang publik bagi masyarakat dalam memenuhi distribusi dan desminasi informasi publik. Dimana ruang publik adalah suatu tempat yang digunakan oleh masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhannya (Purwanto, 2014). Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat perlu diberikan dukungan dan juga pembinaan secara terus menerus dengan berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan untuk menjadikan KIM sebagai lembaga sosial yang memiliki fokus pada jejaring informasi yang berdampak terhadap kecakapan manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan pada setiap KIM, agar kelompok ini dapat menjalankan tugas

sesuai dengan tupoksi sehingga akan mendorong penyebaran informasi secara merata. Melalui kegiatan pemberdayaan terbentuklah keinginan dan harapan yang nantinya akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 bahwa pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk :

1. Terwujudnya jejaring diseminasi informasi nasional.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah.
3. Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi.
4. Membangun masyarakat informasi.

Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki 18 Kecamatan berpotensi dalam melaksanakan program KIM yang merupakan implementasi dari misi ketiga Dinas Kominfo Kab. Mojokerto yaitu “membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata”. Namun dalam pelaksanaannya, KIM di Kabupaten Mojokerto masih terbilang belum cukup aktif dikarenakan Dinas Kominfo Kab. Mojokerto sebagai instansi yang menaungi program KIM baru dibentuk pada tahun 2017.

Pembentukan KIM di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto dapat membantu perekonomian dan dapat mengangkat potensi desa yang ada. Dengan jumlah 18 Kecamatan, dan 299 desa (<https://mojokertokab.go.id/datastatistik/kependudukan>) , maka Kabupaten Mojokerto memiliki potensi desa yang harus dikembangkan dan diberdayakan lagi. Sesuai dengan data tersebut, jumlah KIM yang ada di Kabupaten Mojokerto sekarang berjumlah 18 KIM. Dinas Kominfo Kab. Mojokerto mulai mensosialisasikan program KIM pada awal tahun 2018 kepada setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Melihat jumlah KIM yang cukup banyak dan potensi desa yang ada di Kabupaten Mojokerto, maka pemberdayaan terhadap KIM perlu dilaksanakan karena pada dasarnya keberadaan dan peran Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Mojokerto belum berjalan sesuai fungsinya dan dirasa kurang maksimal dalam menyebarluaskan informasi.

Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Kominfo Kab. Mojokerto dalam program dan

pemberdayaan KIM di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kab. Mojokerto tentunya harus meliputi pembinaan teknis, pendampingan, komunikasi publik, pemberdayaan komunikasi terhadap KIM itu sendiri. Ditulis dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 pasal 9 bahwa pemberdayaan KIM meliputi, pemodelan, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, simulasi dan penyediaan bahan informasi.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan diatas, pemberdayaan dan pendampingan terhadap keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) perlu dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto. Maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilakukan Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto dalam upaya mendorong diseminasi informasi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Dalam Upaya Mendorong Diseminasi Informasi.”

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena analisis deskriptif dirasa cocok dalam menanggapi permasalahan peneliti, serta pencarian informasi akan didapat secara mendalam. Maka dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan kelompok informasi masyarakat yang dilakukan Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto dalam upaya mendorong diseminasi informasi.

Selain itu, dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus, yaitu penggambaran detail atau latar belakang serta sifat yang berasal dari suatu peristiwa. Menurut Sugiyono (2006) pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Dapat diartikan metode studi kasus adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara ilmiah dengan melakukan secara intensif tentang suatu fenomena yang terjadi sesuai dengan realitas sesungguhnya pada tingkatan perorangan, kelompok atau organisasi.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Dengan sumber data primer Kepala Bidang KIP Diskominfo Kabupaten Mojokerto, Kepala Seksi Media Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kabupaten Mojokerto dan juga Ketua KIM Kabupaten Mojokerto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM

adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang informasi, dimana lembaga ini akan diurus oleh masyarakat secara mandiri. Kelompok ini dibentuk untuk mengatasi kesenjangan informasi agar terciptanya diseminasi informasi. Kelompok Informasi Masyarakat akan sangat berpengaruh di wilayah yang memiliki luas wilayah yang cukup luas. Tetapi tingkat sumber daya manusia juga akan mempengaruhi jalannya kelompok ini. Hal ini terjadi di Kabupaten Mojokerto yang memiliki sumber daya manusia kurang dapat mengolah informasi dengan baik karena banyaknya pedesaan di sana. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya KIM akan sangat berdampak pada proses diseminasi di Kabupaten Mojokerto apabila KIM diberdayakan dengan baik. Kabupaten Mojokerto sendiri memiliki 18 KIM yang tersebar di berbagai Kecamatannya. Semua Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Mojokerto terbentuk di tahun 2018 Berikut adalah 18 KIM yang ada di Kabupaten Mojokerto :

Tabel 1 KIM Kabupaten Mojokerto

No	Nama KIM	Kecamatan	Desa
1.	KIM IB News	Sooko	Brangkal
2.	KIM Bejjong	Trowulan	Bejjong
3.	KIM Layang Kunitir	Jatireo	Kunitir
4.	KIM Kebontanggul	Gondang	Kebontanggul
5.	KIM Kridatama	Dlanggu	Pohkecik
6.	KIM Kebonagung	Puri	Kebonagung
7.	KIM Karangasem	Kutorejo	Karangasem
8.	KIM Kesiman	Pacet	Kesiman
9.	KIM Ketapanrame	Trawas	Ketapanrame
10.	KIM Lebaksono	Pungging	Lebaksono
11.	KIM Seduri	Mojosari	Seduri
12.	KIM Pekuwon	Bangsals	Pekuwon
13.	KIM Danyang	Mojoanyar	Mojoanyar

14.	KIM Gempolkerep	Gedeg	Gempolkerep
15.	KIM Madep Mantep	Kemlagi	Kemlagi
16.	KIM Jetis	Jetis	Jetis
17.	KIM Banyulegi	Dawarblandong	Banyulegi
18.	KIM Jatiwaluyo	Ngoro	Jatiwaluyo

Sumber : Hasil penelitian

Dari hasil temuan di lapangan, pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto akan mendorong proses diseminasi informasi. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) masuk ke dalam rencana dan tugas dari Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto karena proses pemberdayaan KIM akan berdampak pada terbentuknya ruang bagi masyarakat dalam mengakses informasi baik informasi dari tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Apabila proses diseminasi informasi berjalan dengan baik maka akan timbul pemerataan informasi dan tidak ada ketimpangan informasi. Dengan jumlah KIM yang dimiliki saat ini yaitu 18 Kelompok Informasi Masyarakat, maka Dinas Kominfo Kabupaten perlu melakukan pemberdayaan agar KIM berjalan dengan semestinya.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto tentu harus meliputi pembinaan teknis, pendampingan, komunikasi publik dan pemberdayaan komunikasi. Bimbingan teknis, pemodelan, workshop, sarasehan, forum, simulasi dan penyediaan bahan informasi, dimana materi pemberdayaan berkaitan dengan kelembagaan, SDM, manajemen dan bagaimana aktivitas lembaga komunikasi sosial adalah cara-cara yang ditulis di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 pasal 9 untuk melakukan kegiatan pemberdayaan KIM. Dengan latar belakang masalah di lingkup masyarakat Kabupaten Mojokerto, mulai dari faktor sosial, ekonomi dan juga pendidikan maka akan berpengaruh pada jalannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di sana.

Pemberdayaan dan pendampingan terhadap keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto. Teori yang dijelaskan oleh Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007) menekankan pada pemberdayaan individu dan juga masyarakat serta pengembangan potensi yang ada di dalam diri setiap individu dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan

kepercayaan diri seseorang serta memberikan akses sumber daya yang dibutuhkan sehingga nantinya masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pemberdayaan. Sejalan dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) tentang bagaimana proses memberdayakan masyarakat dengan melakukan 3 tahap pemberdayaan.

1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran yang dilakukan Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto yaitu berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara melakukan “ledhang” atau menghampiri langsung setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Untuk membantu proses diseminasi informasi dengan kondisi geografis Kabupaten Mojokerto yang luas, Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto merasa perlu melakukan kegiatan sosialisasi agar masyarakat dapat menyadari pentingnya keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Dengan mensosialisasikan program KIM Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto berharap mampu menumbuhkan kesadaran yang nantinya akan berpengaruh pada pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat diharapkan mampu membantu proses diseminasi informasi yang ada di Kabupaten Mojokerto.

2. Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap kedua ini Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto melakukan pemberian kapasitas melalui kegiatan seperti seminar, bimbingan teknis, pelatihan ataupun *workshop* terhadap Kelompok Informasi Masyarakat yang berawal dari kurang mampu menguasai menjadi mampu dan dapat memahami apa tugas dan fungsi dari kelompok tersebut.

Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto yang membahas mengenai “Desain WEB dan Jurnalistik Bagi Kelompok Informasi Masyarakat” juga keikutsertaan KIM Kabupaten Mojokerto di acara Jatim Kominfo Festival (JKF) adalah salah satu bentuk proses pemberdayaan dalam hal pengkapasitasan.

3. Tahap Pendayaan

Bentuk dari tahap pendayaan dalam proses pemberdayaan yang telah dilakukan Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto adalah tentang bagaimana Kelompok Informasi Masyarakat diberikan kepercayaan, otoritas, dan kekuasaan yang sebelumnya telah melalui tahap pengkapasitasan untuk mengolah secara mandiri *website* desa dan juga media lain seperti *Youtube* yang digunakan untuk membantu Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto dalam mendiseminasi informasi.

Pada Bimbingan teknis yang telah dilakukan

oleh Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto kepada KIM dengan menekankan bagaimana cara mengolah dan membuat *website* serta cara menulis artikel berita dengan benar, mereka dapat mengisi atau menulis *website* yang telah terbentuk karena telah dibekali melalui bimbingan teknis pada tahap pengkasitasan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemberdayaan dan pembinaan terhadap keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto, dikarenakan urgensi kehadiran KIM akan berdampak pada diseminasi informasi. Kehadiran Kelompok Informasi Publik dapat dijadikan sebagai lembaga sampingan bagi masyarakat dalam menerima dan mengolah setiap informasi yang ada.

Pemberdayaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat yang masuk ke dalam rencana dan tugas Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto telah dilakukan demi terwujudnya jejaring diseminasi informasi publik. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan yang digunakan dalam penelitian ini, dimana pemberdayaan meliputi 3 tahapan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan juga pendayaan.

SARAN

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan mengenai pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam mendorong diseminasi informasi, berikut beberapa saran :

1. Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto perlu memberikan dukungan lagi terhadap Kelompok Informasi Masyarakat terkait akses ketersediaan untuk kebutuhan informasi KIM itu sendiri dengan harapan agar dapat mengembangkan aktifitas KIM.
2. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan KIM yang melibatkan seluruh KIM yang ada di Kabupaten Mojokerto dan juga masyarakat umum sehingga memungkinkan anggota KIM dapat mengembangkan jejaring agar lebih meluas.
3. Membentuk sinergitas antara KIM dengan Pemerintah Kabupaten melalui pemeran KIM agar berdampak pada eksistensi KIM di Kabupaten Mojokerto.
4. Sosialisasi KIM yang dilakukan seharusnya lebih mendekati atau bersegmentasi ke masyarakat secara meluas agar setiap kegiatan KIM mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar.
5. Meningkatkan nilai dari KIM di Kabupaten Mojokerto melalui kegiatan seperti pembinaan yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Kominfo

Kabupaten Mojokerto dilanjutkan dengan evaluasi kerja KIM secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ambarwulan, Wiwin. 2010. *Remote Sensing of Tropical Coastal Water: Study of The Berau Estuary*. East Kalimantan, Indonesia. Disertasi. Netherlands: ITC Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hardjanto, Imam. 2013. *Teori Pembangunan (jilid I)*. Buku Ajar Program Magister Universitas Brawijaya. Malang.
- Herdiansyah, H. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Selemba Humanika.
- Indardi. 2010. *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Unpad Press.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M.L. Jhingan. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto, T. dan Soebianto, P. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nain, U. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS.
- Permen Kominfo No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan komunikasi.
- Setiadi, E.M. dan. Kolip, U. 2011. *Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Setyowati, Yuli. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi – Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Wrihartnolo, Randi dan Dwidjowijoto, N.R. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Gramedia.

Skripsi dan Jurnal

- Afni, Wirda. 2013. Analisis Pelaksanaan Pembanguann Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. (skripsi). Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Alfando, Johantan. 2013. Peranan Kelompok Informasi Masyaakat (KIM) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kutai Kartanegara. *e-Journal Ilmu Komunikasi*. Volume 1 (2).
- Cristian, Harry. 2015. Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Rkpdes) Tahun 2013 Di Desa Coajanan Ulu Kecamatan Loa Janam Kabupaten Kutai Karta Negara. *eJournal pemerintahan integratif*. Volume 3 (1).
- Damanik, F.N.S. 2012. Menjadi Masyarakat Informasi. *STMIK Mikrosil*. Vol 13 (1): 73-82.
- Habibah, A.F. dan Irwansyah. 2021. Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*. Vol. 3 (2): 350-363.
- Hayati, N. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 5: 5375-5388.
- Lumunitang, Juliana. 2015. Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Masyarakat di Desa Tara-Tara I. *E-Journal "Acta Diurna"*. Vol 4 (2).
- Nanda, Rama. 2018. Evaluasi Dampak Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Dalam Upaya Pengembangan Potensi Desa (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu dan Kelompok Informasi Masyarakat Anjasmoro Desa Tulungrejo Kota Batu). (skripsi). Fakuktas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Purwanto, Edi. 2014. *Privatisasi Ruang Publik Dari Civic Centre Menjadi Central Business District (Belajar dari Kasus Kawasan Simpang Lima Semarang)*. *Jurnal Tata Loka*. Vol. 16(3) : 153-

167.

- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*. Vol 2(1): 189–199.
- Safitri, S. 2016. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Criksetra*. Vol 5(9): 79-83.
- Sri Widyastuti, Sri Sri Ambarwati dan Herlan. 2019. *Diseminasi Pengayaan Kosakata (Pusat Pengembangan Dan Perlindungan, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian P&K Republik Indonesia)*, *Jurnal “Abdimas”*. Vol. 1 (1): 37-40.
- Yalia, Mulyono. 2015. *Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (Studi Pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat)*. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. Vol. 19 (1) : 29-41.

